

## **PENERAPAN PRINSIP EKOWISATA PADA REDESAIN FASILITAS PUSAT INFORMASI MANGROVE DI KOTA PEKALONGAN**

**Sarah Syarifah Hanun, Mohammad Muqoffa, Ana Hardiana**  
Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta  
sarahsyarifahhanun@student.uns.ac.id

### **Abstrak**

*Ekowisata merupakan bentuk kegiatan wisata yang bertanggungjawab terhadap pelestarian sumber daya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Pelaksanaan ekowisata di Indonesia berdasarkan pada lima prinsip, yaitu prinsip pelestarian, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan partisipasi masyarakat lokal. Kota Pekalongan memiliki Pusat Informasi Mangrove sebagai wadah pengelolaan ekosistem mangrove berbasis wisata alam. Pusat Informasi Mangrove dibangun dengan visi pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar pesisir Kota Pekalongan. Berdasarkan visi tersebut, Pusat Informasi Mangrove memiliki potensi sebagai kawasan ekowisata. Akan tetapi, Pusat Informasi Mangrove belum memiliki fasilitas yang dapat memwadahi aktivitas berbasis ekowisata secara maksimal. Evaluasi purna huni dilakukan untuk mengetahui potensi dari fasilitas eksisting dan kebutuhan fasilitas baru pada kawasan. Hasil dari evaluasi purna huni akan menjadi dasar penerapan prinsip ekowisata pada redesain kawasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan prinsip ekowisata pada redesain fasilitas Pusat Informasi Mangrove di Kota Pekalongan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif berupa observasi pada kawasan Pusat Informasi Mangrove, wawancara dengan dinas terkait, studi literatur ekowisata, studi preseden, dan data evaluasi purna huni. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip pelestarian, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan partisipasi masyarakat lokal pada redesain fasilitas Pusat Informasi Mangrove di Kota Pekalongan.*

**Kata kunci:** ekowisata, fasilitas, mangrove, pusat informasi, redesain.

### **1. PENDAHULUAN**

Mangrove merupakan bagian penting dari ekosistem wilayah pesisir pantai karena memiliki manfaat secara ekologis dan ekonomis. Manfaat ekologis dari mangrove yaitu sebagai pelindung garis pantai dari gelombang laut, pencegahan dari aberasi pantai, penstabil iklim mikro pesisir, penghasil oksigen dalam jumlah besar, serta habitat bagi beberapa jenis binatang pesisir. Sementara itu, manfaat ekonomis dari mangrove yaitu sebagai bahan makanan dan kerajinan tangan untuk menambah penghasilan masyarakat sekitar pesisir pantai.

Manfaat yang diperoleh dari mangrove tidak diimbangi dengan upaya pelestarian hutan mangrove. Kondisi hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan jumlah akibat konversi lahan basah untuk permukiman dan eksploitasi mangrove secara besar-besaran. Jumlah hutan mangrove di Indonesia turun dari 3,5 juta hektare pada tahun 1990 menjadi 2,9 juta hektare pada tahun 2016 (Krisnawati, 2017). Berdasarkan kondisi tersebut, muncul urgensi perlindungan dan konservasi hutan mangrove di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM). Terdapat beberapa arah kebijakan yang ditetapkan oleh SNPEM, diantaranya yaitu mengendalikan pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove melalui prinsip pelestarian serta pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat.

Kota Pekalongan sebagai salah satu wilayah pesisir di Indonesia memiliki potensi alam berupa hutan mangrove. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan tahun 2009-2029, pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa hutan mangrove

dialokasikan sebesar 80 hektare di sepanjang garis pantai Kota Pekalongan. Dalam rangka mewujudkan prinsip pelestarian dan pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mendirikan Pusat Informasi Mangrove (PIM) sebagai wadah pengelolaan hutan mangrove.

Prinsip pelestarian dan pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat merupakan prinsip dari ekowisata. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, ekowisata merupakan kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Aktivitas ekowisata menitikberatkan pada pengamatan dan pemahaman akan daerah yang dikunjungi disertai dengan partisipasi terhadap upaya pelestarian di kawasan tersebut serta pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat. Pengembangan ekowisata di Indonesia menerapkan lima prinsip dasar, yaitu pelestarian, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan partisipasi dari masyarakat lokal (UNESCO Office Jakarta, 2009).

Pusat Informasi Mangrove (PIM) Pekalongan memiliki potensi sebagai kawasan ekowisata. Dinas Kota Pekalongan mengelompokkan PIM dalam *cluster* kawasan wisata bahari dengan tiga keunggulan wisata, yaitu edukasi, alam, dan kuliner. Wisata edukasi dan alam merupakan potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk mendukung upaya pelestarian alam. Sementara itu, wisata kuliner merupakan potensi wisata yang dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomis dengan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal pada pelaksanaannya. Kegiatan berbasis ekowisata yang telah dilakukan di PIM yaitu kegiatan pembibitan hutan mangrove serta pelatihan pembuatan produk berbahan dasar mangrove terhadap kelompok masyarakat binaan (POKMAS).

Potensi ekowisata yang dimiliki Pusat Informasi Mangrove (PIM) Pekalongan belum didukung oleh keberadaan fasilitas yang memadai. Pengunjung yang datang ke PIM sebagian besar hanya menikmati fasilitas rekreasi tanpa adanya unsur edukasi dan pelestarian mengenai mangrove. Tidak ada fasilitas untuk kegiatan pengembangan hutan mangrove. Kelompok masyarakat binaan (POKMAS) yang telah mengikuti pelatihan tidak memiliki wadah untuk menjual hasil produknya di kawasan. Fasilitas edukasi yang tersedia hanya berupa ruang *display* kecil di dalam gedung kantor yang letaknya tersembunyi serta tertutup sehingga tidak dapat dijangkau secara bebas oleh pengunjung.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pusat Informasi Mangrove (PIM) Pekalongan belum memiliki fasilitas yang dapat memwadahi aktivitas berbasis ekowisata secara maksimal. Adanya potensi dan permasalahan pada kawasan PIM eksisting akan diselesaikan dengan proses redesain. Redesain merupakan upaya membangun kembali dan merombak secara seksama dan atau memperbaiki kesalahan dari obyek yang telah dibangun (Frick & Suskiyatno, 2009). Proses redesain dilakukan melalui tahap Evaluasi Purna Huni (EPH) untuk mengetahui potensi dari fasilitas eksisting serta kebutuhan akan penambahan fasilitas baru pada PIM. Hasil dari tahap EPH tersebut akan digunakan sebagai dasar penerapan lima prinsip ekowisata pada redesain fasilitas di kawasan PIM sehingga dapat memwadahi aktivitas berbasis ekowisata secara maksimal. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip ekowisata pada fasilitas PIM berupa massa dan peruangan.

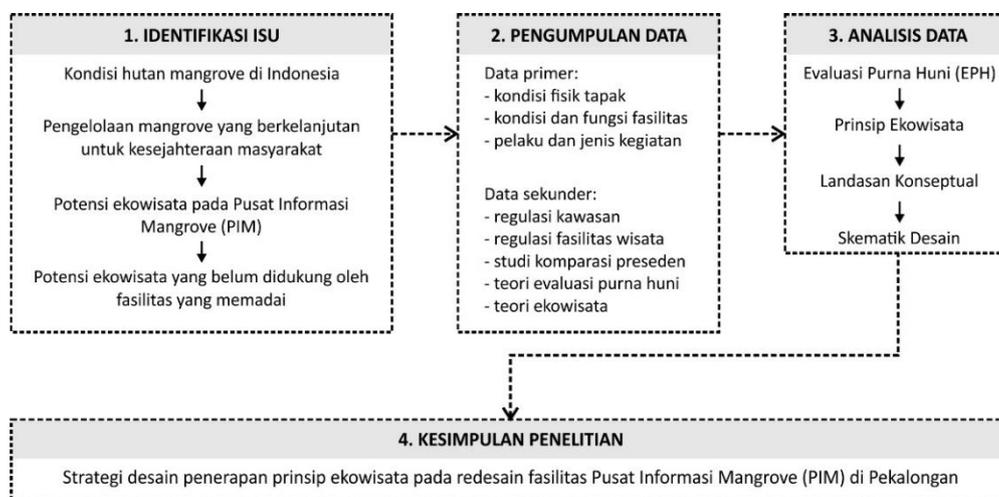
## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif-kualitatif. Secara garis besar, metode deskriptif-kualitatif meliputi empat tahap, yaitu identifikasi isu, pengumpulan data, analisis, dan perumusan strategi desain. Tahap pertama yaitu identifikasi dari isu yang ada di lapangan, yaitu permasalahan ketersediaan fasilitas pada Pusat Informasi Mangrove (PIM) di Kota Pekalongan kaitannya dengan penerapan prinsip ekowisata. Fasilitas yang tersedia pada PIM belum dapat memwadahi aktivitas ekowisata secara maksimal, sehingga dibutuhkan strategi penerapan prinsip ekowisata pada fasilitas PIM yang telah melalui tahap redesain.

Tahap kedua yaitu pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan isu. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kondisi kondisi dan fungsi fasilitas eksisting serta jenis kegiatan yang terjadi pada Pusat Informasi Mangrove (PIM). Data tersebut diperoleh dengan observasi pada tapak dan wawancara kepada pengelola PIM. Sementara itu, data sekunder meliputi studi literatur yang dibutuhkan untuk tahap Evaluasi Purna Huni (EPH) pada fasilitas PIM, sehingga menghasilkan data berupa redesain fasilitas yang digunakan untuk penerapan prinsip ekowisata. Studi literatur yang dibutuhkan yaitu regulasi pembangunan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan, perencanaan fasilitas wisata berdasarkan Peraturan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, teori Evaluasi Purna Huni, studi komparasi terhadap preseden yang ada, dan teori prinsip ekowisata.

Tahap ketiga yaitu analisis dari data yang telah diperoleh. Tahap analisis pertama berupa Evaluasi Purna Huni (EPH) untuk mengetahui secara rinci mengenai keberlangsungan Pusat Informasi Mangrove (PIM). Data mengenai kondisi tapak, kondisi fasilitas, dan jenis kegiatan pelaku akan dianalisis dengan data kebutuhan fasilitas berdasarkan aturan perencanaan fasilitas wisata dan studi komparasi preseden. Hasil dari EPH berupa data mengenai fasilitas apa saja yang akan dipertahankan maupun ditingkatkan pada tahap redesain PIM. Hasil analisis EPH akan dianalisis dengan teori prinsip ekowisata untuk menerapkan prinsip pelaksanaan ekowisata pada fasilitas yang telah diredesain. Hasil akhir dari tahap analisis berupa landasan konseptual penerapan prinsip ekowisata pada redesain fasilitas PIM di Kota Pekalongan. Landasan konseptual tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan skematik desain berupa objek rancang bangun yang disajikan secara deskriptif dan visual.

Tahap terakhir yaitu rumusan strategi desain dari penerapan prinsip ekowisata pada redesain fasilitas Pusat Informasi Mangrove di Kota Pekalongan. Kerangka metode penelitian dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 1  
Kerangka Metode Penelitian

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Informasi Mangrove (PIM) terletak di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Kawasan PIM memiliki luas ± 5,7 hektare dan terletak ± 100 meter dari pinggir Laut Jawa. Kawasan PIM berbatasan dengan area pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dialokasikan untuk hutan mangrove menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan. Letak kawasan yang berdekatan dengan pantai menjadikan PIM sebagai bagian dari perencanaan kawasan wisata bahari. Oleh karena itu, seluruh aktivitas di dalam PIM berupa kegiatan wisata yang menggabungkan unsur pelestarian dan pengelolaan ekosistem mangrove

berbasis masyarakat. Kegiatan wisata yang dilakukan di PIM harus memberikan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran pengunjung mengenai pentingnya mangrove bagi alam dan manusia.



**Gambar 2**  
Lokasi Pusat Informasi Mangrove (PIM) di Kota Pekalongan

Pusat Informasi Mangrove (PIM) merupakan kawasan eksisting yang telah berjalan sehingga terdapat fasilitas eksisting di dalamnya. Fasilitas eksisting tersebut akan dihilangkan, diperbaiki, maupun ditingkatkan berdasarkan kesesuaian fasilitas terhadap kebutuhan PIM sebagai kawasan wisata. Tahap Evaluasi Purna Huni (EPH) dilakukan terhadap fasilitas eksisting tersebut. Tahap EPH menggunakan tiga aspek penilaian, yaitu aspek fungsional, teknis, dan perilaku (Preiser, 2001). Hasil dari EPH pada fasilitas eksisting PIM yaitu sebagai berikut:

**TABEL 1**  
HASIL EVALUASI PURNA HUNI PADA FASILITAS EKSISTING PUSAT INFORMASI MANGROVE

No.	Fasilitas	Penilaian	Keputusan
1.	Loket	Kondisi bangunan baik, namun tidak berfungsi sama sekali sebagai loket. Posisi loket berada di sisi kanan akses masuk, sedangkan kendaraan masuk ke kawasan dari sisi kiri jalan.	Diperbaiki dengan mengubah posisi loket.
2.	Area parkir	Kondisi area parkir cukup baik dan berfungsi dengan baik sebagai sarana memarkirkan kendaraan. Akan tetapi, tidak terdapat area pejalan kaki untuk pengunjung setelah memarkirkan kendaraan sehingga rawan terjadi kecelakaan.	Diperbaiki dengan menambah jalur pejalan kaki di sekeliling area parkir.
3a.	Kolam budidaya rumput laut	Kondisi area baik dan berfungsi cukup baik sebagai lokasi budidaya. Akan tetapi, tidak terdapat jalur pejalan kaki di sekeliling kolam dan area peneduh ( <i>shelter</i> ) untuk pengunjung yang mengakses fasilitas ini.	Dipertahankan dengan menambah jalur pejalan kaki dan peneduh.
3b.	Kolam budidaya kepiting	Kondisi area baik dan berfungsi cukup baik sebagai lokasi budidaya. Akan tetapi, tidak terdapat jalur pejalan kaki di sekeliling kolam dan area peneduh ( <i>shelter</i> ) untuk pengunjung yang mengakses fasilitas ini.	Dipertahankan dengan menambah jalur pejalan kaki dan peneduh.
4.	Gedung PRPM	Kondisi bangunan baik dan berfungsi dengan baik sebagai kantor administrasi. Terdapat ruang yang tidak sesuai dengan kelompok fungsi di dalamnya, yaitu ruang <i>display</i> .	Dipertahankan dengan menghilangkan ruang <i>display</i> .
5.	Gardu Pandang	Kondisi bangunan buruk dengan dinding dan struktur yang telah rusak. Kondisi bangunan yang buruk akan mempengaruhi keamanan pengunjung. Selain itu, peletakan gardu tidak tepat karena tidak menjangkau pandangan yang luas pada tapak dari ketinggian.	Diperbaiki dengan mengganti gardu pandang yang baru di posisi yang lebih strategis.
6.	Pusat Bibit Mangrove	Kondisi area baik dan berfungsi cukup baik sebagai lokasi pembibitan mangrove. Akan tetapi, tidak terdapat jalur	Diperbaiki dengan menambah jalur

No.	Fasilitas	Penilaian	Keputusan
		pejalan kaki di sekeliling kolam dan area peneduh ( <i>shelter</i> ).	pejalan kaki dan <i>shelter</i> .
7.	Warung	Fasilitas non permanen berupa tenda.	Dihilangkan.
8a.	<i>Shelter</i>	Kondisi bangunan baik dan berfungsi dengan baik sebagai <i>shelter</i> .	Dipertahankan.
8b.	<i>Shelter</i>	Kondisi bangunan baik, namun tidak berfungsi dengan baik. <i>Shelter</i> terpisah jauh dengan <i>shelter</i> lain dengan akses jalan setapak yang terputus.	Dihilangkan.
9.	Kandang burung	Kondisi bangunan buruk karena rusak. Bangunan tidak berfungsi karena tidak terdapat satwa di dalamnya.	Dihilangkan.
10.	Kapal wisata	Kondisi area cukup baik dan berfungsi dengan cukup baik.	Dipertahankan.



Gambar 3

Lokasi fasilitas eksisting PIM



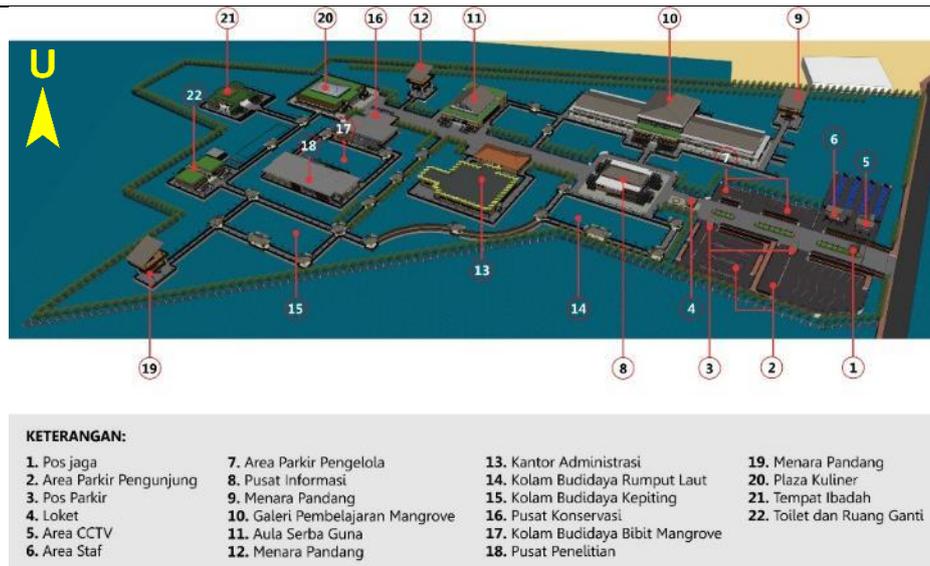
Gambar 4

Hasil EPH fasilitas eksisting PIM

Selain evaluasi pada fasilitas eksisting, tahap Evaluasi Purna Huni (EPH) juga mengevaluasi kebutuhan akan penambahan fasilitas baru. Penambahan fasilitas baru pada kawasan PIM dilakukan berdasarkan kebutuhan aktivitas wisata yang belum terwadahi oleh fasilitas eksisting. Tahap EPH ini dilakukan dengan mengkomparasikan fasilitas eksisting PIM yang dipertahankan dengan standardisasi perencanaan fasilitas wisata serta studi preseden. Hasil dari EPH ialah sebagai berikut:

TABEL 2  
HASIL EVALUASI PURNA HUNI PENAMBAHAN FASILITAS PUSAT INFORMASI MANGROVE

No.	Fasilitas	Eksisting	Keputusan
1.	Pusat informasi wisata	Tidak ada	Menambah fasilitas pusat informasi wisata
2.	Ruang ganti dan/atau toilet	Tidak ada	Menambah fasilitas ruang ganti dan/atau toilet.
3.	Panggung pertunjukan	Tidak ada	Menambah fasilitas panggung kesenian/pertunjukan.
4.	Gazebo/ <i>shelter</i>	Ada dalam jumlah sedikit	Menambah jumlah <i>shelter</i> sehingga pengunjung dapat mudah beristirahat di <i>shelter</i> terdekat.
5.	Kios cinderamata	Tidak ada	Menambah fasilitas kios cinderamata.
6.	Plaza pusat jajanan/kuliner	Tidak ada	Menambah fasilitas plaza pusat jajanan/kuliner.
7.	Tempat ibadah	Tidak ada	Menambah fasilitas tempat ibadah.
8.	Menara pandang	Ada dalam jumlah sedikit	Menambah jumlah menara pandang sehingga pengunjung dapat melihat seluruh sudut kawasan.
9.	Tempat parkir	Ada	-
10.	Dermaga wisata kapal	Tidak ada	Menambah fasilitas dermaga wisata kapal.
11.	Galeri mangrove	Tidak ada	Menambah fasilitas galeri mangrove.
12.	Ruang penelitian	Tidak ada	Menambah fasilitas ruang penelitian.
13.	Ruang <i>workshop</i>	Tidak ada	Menambah fasilitas ruang <i>workshop</i> .

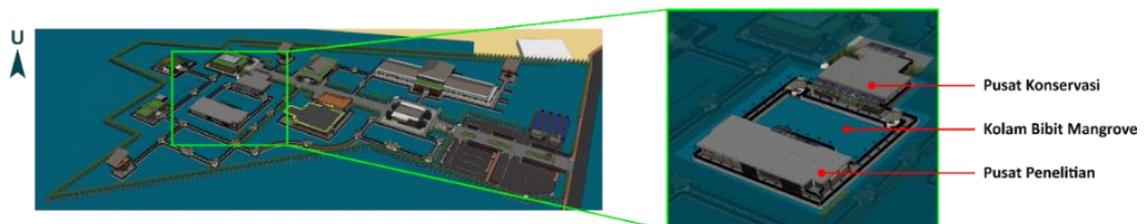


**Gambar 5**  
**Fasilitas di Pusat Informasi Mangrove (PIM)**

Hasil redesain fasilitas Pusat Informasi Mangrove (PIM) digunakan dalam tahap analisis penerapan prinsip ekowisata. Penerapan ekowisata di Indonesia didasarkan pada lima prinsip, yaitu (1) pelestarian, (2) pendidikan, (3) pariwisata, (4) ekonomi, dan (5) partisipasi masyarakat lokal. Kelima prinsip tersebut kemudian diterjemahkan dan diterapkan pada redesain fasilitas sebagai berikut:

### 1. Prinsip Pelestarian

Prinsip pelestarian dalam ekowisata berkaitan dengan kegiatan pelestarian alam di kawasan wisata. Kegiatan pelestarian yang dilakukan di Pusat Informasi Mangrove (PIM) harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas mangrove dan ekosistem di sekitarnya tanpa menimbulkan kerusakan dan pencemaran. Partisipasi pengunjung dalam kegiatan pembelajaran dan penanaman bibit mangrove diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Kegiatan tersebut diwadahi oleh fasilitas pusat konservasi.



**Gambar 6**  
**Lokasi Pusat Konservasi, Kolam Bibit Mangrove, dan Pusat Penelitian**

Pusat konservasi berfungsi sebagai wadah bagi pengunjung untuk belajar tentang mangrove dan ekosistem sekitarnya, khususnya yang berhubungan dengan teknik pelestarian mangrove. Terdapat ruang workshop untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Ruang workshop tersebut memiliki konsep ruang belajar kelompok dengan meja pemandu dan proyektor di salah satu sisi ruangan.

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, pengunjung akan didampingi untuk melakukan kegiatan penanaman bibit mangrove. Kolam bibit mangrove terletak bersebelahan dengan Pusat konservasi sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan penanaman. Bibit mangrove akan ditanam di area sekitar kawasan Pusat Informasi Mangrove (PIM).



**Gambar 7**  
**Pusat Konservasi**

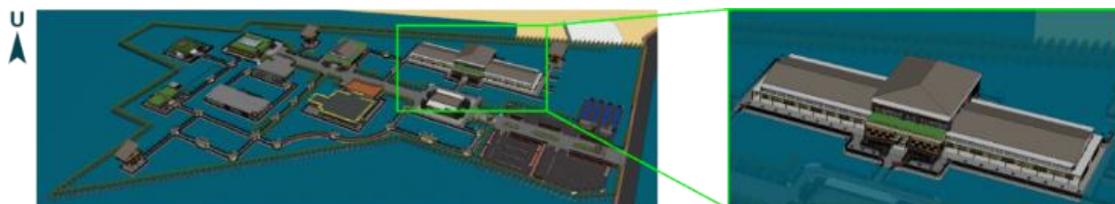
Kegiatan pelestarian tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah pohon mangrove, namun juga peningkatan kualitas mangrove dan ekosistemnya. Pusat penelitian dirancang sebagai wadah kegiatan penelitian dan pengembangan hutan mangrove. Terdapat laboratorium sebagai ruang utama untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan. Selain ruang laboratorium, terdapat ruang penyimpanan sampel, alat, dan bahan kimia untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Seluruh ruangan tersebut hanya dapat diakses oleh peneliti dan tamu institusi, sehingga bersifat semi privat.



**Gambar 8**  
**Pusat Penelitian**

## 2. Prinsip Pendidikan

Prinsip pendidikan dalam ekowisata yaitu adanya unsur pendidikan dalam kegiatan wisata (eduwisata). Eduwisata memperhatikan 2 aspek utama, yaitu aspek edukasi berupa penyampaian pengetahuan kepada pengunjung, serta aspek wisata yaitu kenyamanan dan keamanan pengunjung (Romala, Musyawaroh, & Nugroho, 2020). Fasilitas eduwisata pada Pusat Informasi Mangrove (PIM) harus menyajikan pengetahuan secara jelas, menarik, dan interaktif agar pengunjung tertarik untuk belajar tentang profil serta manfaat mangrove dan ekosistemnya dengan aman dan nyaman. Fasilitas eduwisata diwadahi di Galeri Pembelajaran Mangrove.



**Gambar 9**  
**Lokasi Galeri Pemanfaatan Mangrove**

Galeri Pembelajaran Mangrove berfungsi sebagai wadah bagi pengunjung untuk belajar tentang mangrove dan ekosistemnya serta manfaatnya bagi alam dan manusia. Pengunjung dapat belajar mengenai jenis-jenis mangrove, ekosistem hutan mangrove, serta pemanfaatan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan PIM. Galeri Pembelajaran Mangrove memiliki konsep ruang galeri dan pameran. Pengetahuan mengenai jenis-jenis mangrove dan ekosistemnya disajikan dalam bentuk foto, infografis, dan binatang imitasi dalam ruang galeri.

Sementara itu, pengetahuan mengenai pemanfaatan mangrove disajikan dalam bentuk pameran produk makanan, tekstil, dan kerajinan tangan dalam ruang pameran.



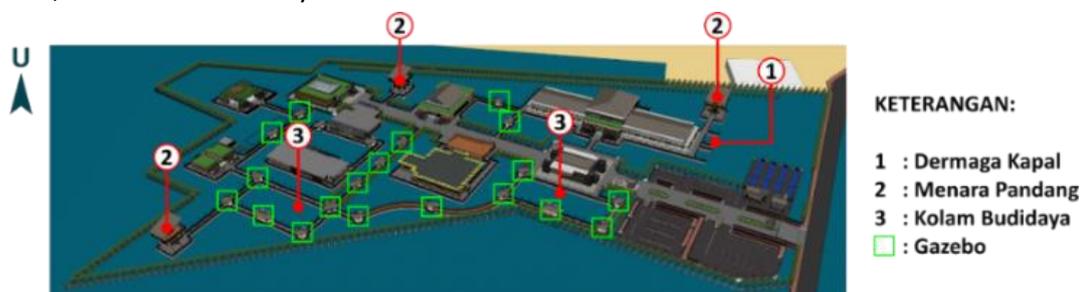
Gambar 10  
Ruang Galeri



Gambar 11  
Ruang Pameran

### 3. Prinsip Pariwisata

Prinsip pariwisata dalam ekowisata berkaitan dengan kegiatan wisata yang mengandung unsur kesenangan dan rekreasi. Unsur kesenangan dan rekreasi menjadi daya tarik suatu tempat wisata. Pusat Informasi Mangrove (PIM) memiliki potensi wisata berupa hutan mangrove dan ekosistemnya yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas wisata. Oleh karena itu, fasilitas yang memudahkan kegiatan wisata yaitu dermaga kapal, menara pandang, gazebo, serta kolam budidaya.



Gambar 12  
Lokasi Dermaga Kapal, Menara Pandang, Kolam Budidaya, dan Gazebo

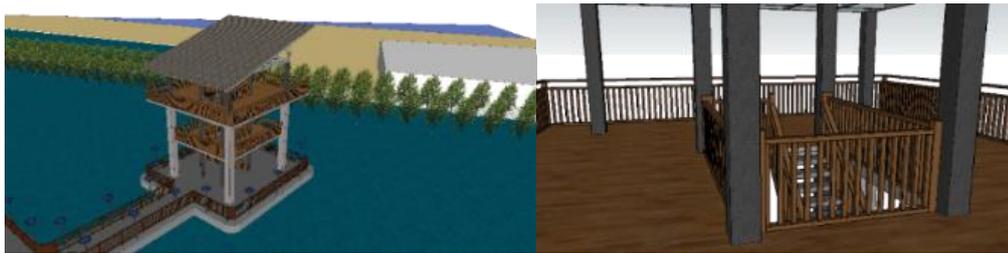
Dermaga kapal merupakan fasilitas untuk kegiatan wisata hutan mangrove di Pusat Informasi Mangrove (PIM). Pengunjung dapat menaiki kapal mesin untuk menelusuri lorong

hutan mangrove di sisi utara kawasan. Lokasi dermaga kapal berada di sisi timur Galeri Pembelajaran Mangrove untuk kemudahan akses menuju lorong hutan mangrove di sisi utara kawasan. Konsep dermaga kapal yaitu ruang terbuka dengan kapal mesin yang diparkirkan di sisi dermaga. Pengelolaan fasilitas dermaga kapal akan melibatkan kelompok masyarakat (POKMAS).



**Gambar 13**  
**Dermaga Kapal**

Menara pandang merupakan fasilitas untuk melihat pemandangan kawasan Pusat Informasi Mangrove (PIM) dari ketinggian. Menara pandang memiliki tinggi 8 meter dengan dua lanai sehingga dapat memwadahi beberapa pengunjung sekaligus. Terdapat tiga menara pandang yang tersebar di kawasan, yaitu dua menara di sisi utara dan satu menara di sisi selatan. Selain digunakan sebagai fasilitas wisata, menara pandang juga dapat digunakan oleh pengelola untuk mengawasi kawasan dan mengamati ketinggian laut.



**Gambar 14**  
**Menara Pandang**

Kolam budidaya merupakan fasilitas untuk mengembangbiakkan hasil alam di kawasan Pusat Informasi Mangrove (PIM). Terdapat dua kolam budidaya, yaitu kolam budidaya rumput laut dan kolam budidaya kepiting. Terdapat gazebo pada sisi kolam budidaya yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk berteduh sekaligus menikmati pemandangan kolam. Pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan panen rumput laut dan kepiting bersama kelompok masyarakat (POKMAS). Kolam budidaya rumput laut berada di sisi timur kawasan, sedangkan kolam budidaya kepiting berada sisi selatan kawasan.



**Gambar 15**  
**Kolam Budidaya Rumput Laut**



**Gambar 16**  
**Kolam Budidaya Kepiting**

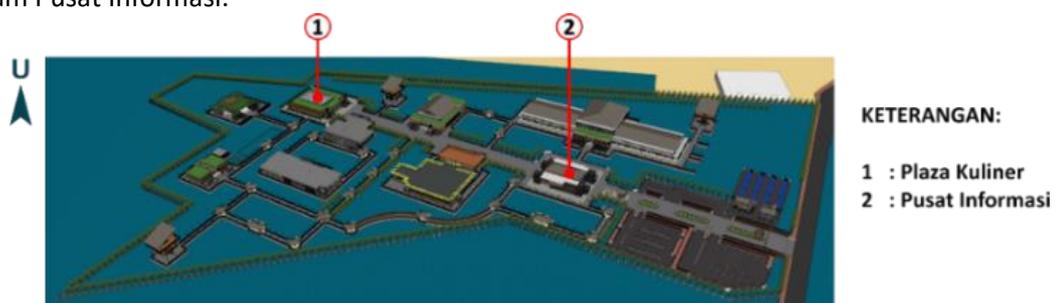
Gazebo merupakan fasilitas untuk berteduh sekaligus menikmati pemandangan kawasan. Gazebo terletak di sepanjang jalur pejalan kaki sehingga pengunjung dapat berteduh kapan saja tanpa perlu menempuh jarak yang terlalu jauh.



**Gambar 17**  
**Gazebo**

#### 4. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi dalam ekowisata berkaitan dengan kegiatan yang memiliki peluang ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan wisata di dalam Pusat Informasi Mangrove (PIM) dengan menjual berbagai macam produk. Kegiatan tersebut diwadahi oleh plaza kuliner dan kios cinderamata yang berada di dalam Pusat Informasi.



**Gambar 18**  
**Lokasi Plaza Kuliner dan Pusat Informasi**

Plaza kuliner merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk menjual produk makanan dan minuman. Plaza kuliner merupakan solusi dari kebutuhan akan fasilitas makan dan minum di Pusat Informasi Mangrove (PIM). Konsep ruang pada plaza kuliner yaitu area makan yang dikelilingi oleh beberapa kios penjual. Akses ruang yang terbuka dengan atap *skylight* memberi nuansa plaza semi *outdoor* tanpa harus berpanas-panasan di bawah terik matahari sehingga pengunjung dapat melakukan kegiatan makan dan minum dengan nyaman.



**Gambar 19**  
**Plaza Kuliner**

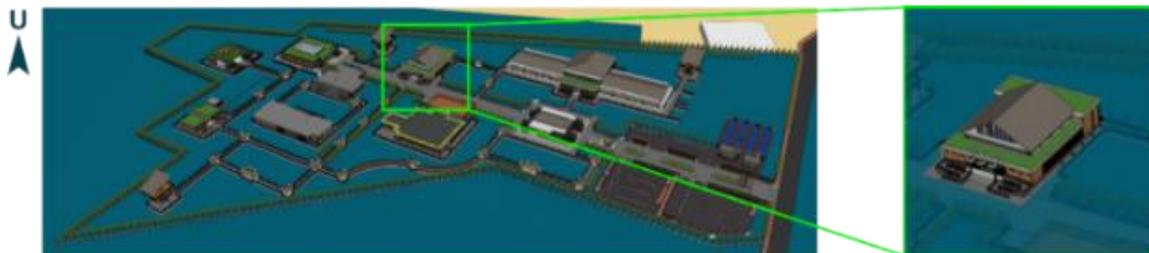
Kios cinderamata merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk menjual produk makanan kemasan dan kerajinan tangan. Kios cinderamata merupakan solusi kebutuhan akan fasilitas penjualan cinderamata bertema mangrove. Kios cinderamata terletak di dalam Pusat Informasi sebagai bagian dari wadah promosi wisata Pusat Informasi Mangrove (PIM). Peletakan kios cinderamata di dalam Pusat Informasi dimaksudkan agar pengunjung dapat membeli cinderamata setelah selesai melakukan kegiatan di dalam PIM.



**Gambar 20**  
**Kios Cinderamata di dalam Pusat Informasi**

#### 5. Prinsip Partisipasi Masyarakat Lokal

Prinsip partisipasi masyarakat dalam ekowisata berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata. Keterlibatan masyarakat timbul ketika potensi pada kawasan wisata memberikan manfaat bagi masyarakat. Agar potensi pada kawasan wisata dapat memberi manfaat secara maksimal, maka perlu adanya kegiatan pelatihan bagi masyarakat. Kegiatan pelatihan tersebut diwadahi di aula serba guna.



**Gambar 21**  
**Lokasi Aula Serba Guna**

Aula serba guna merupakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Pusat Informasi Mangrove (PIM). Kegiatan pelatihan yang diadakan berupa pengelolaan fasilitas yang ada di PIM serta pengolahan mangrove dan hasil alam di sekitarnya menjadi produk siap jual. Konsep ruang dari aula serba guna yaitu ruang aula dengan panggung di salah satu sisi bangunan. Terdapat pintu di kedua sisi panggung untuk akses dari ruang selasar.



**Gambar 22**  
**Aula Serba Guna**

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah prinsip ekowisata dapat menjadi landasan perancangan redesain fasilitas di kawasan wisata Pusat Informasi Mangrove (PIM). Prinsip ekowisata yang diterapkan pada perancangan fasilitas PIM yaitu prinsip pelestarian, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan partisipasi masyarakat lokal. Prinsip pelestarian diterapkan pada fasilitas pusat konservasi dan pusat penelitian. Prinsip pendidikan diterapkan pada fasilitas Galeri Pembelajaran Mangrove. Prinsip pariwisata diterapkan pada fasilitas dermaga kapal, menara pandang, kolam budidaya rumput laut, kolam budidaya kepiting, dan gazebo. Prinsip ekonomi diterapkan pada fasilitas plaza kuliner dan kios cinderamata. Prinsip partisipasi masyarakat lokal diterapkan pada fasilitas aula serba guna.

Penerapan prinsip ekowisata pada perancangan redesain fasilitas PIM diharapkan dapat menciptakan kawasan wisata yang bertanggung jawab dalam rangka upaya pelestarian dan pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat di Kota Pekalongan. Selain diterapkan pada PIM, prinsip ekowisata hendaknya juga dapat diterapkan pada kawasan wisata alam lainnya agar meminimalisir eksploitasi kawasan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan usaha masyarakat lokal.

#### **REFERENSI**

- Frick, H., & Suskiyatno, F. B. (2009). *Seri Eko-Arsitektur 1: Dasar-dasar eko-arsitektur*. Yogyakarta: PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI).
- Krisnawati, H. (2017). Hutan Mangrove untuk Mitigasi Perubahan Iklim. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah*. (2009).
- Preiser, W. F. E. (2001). The Evolution of Post-Occupancy Evaluation: Toward Building Performance and Universal Design Evaluation. In *LEARNING FROM OUR BUILDINGS A State-of-the-Practice Summary of Post-Occupancy Evaluation*. Washington DC: National Academy Press.
- Romala, F. M. T., Musywaroh, M., & Nugroho, P. S. (2020). PENERAPAN KONSEP EDUWISATA PADA PUSAT PENGOLAHAN SAMPAH PUTRI CEMPO. *Senthong*, 3(2), 415–426.
- UNESCO Office Jakarta. (2009). *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185506>